

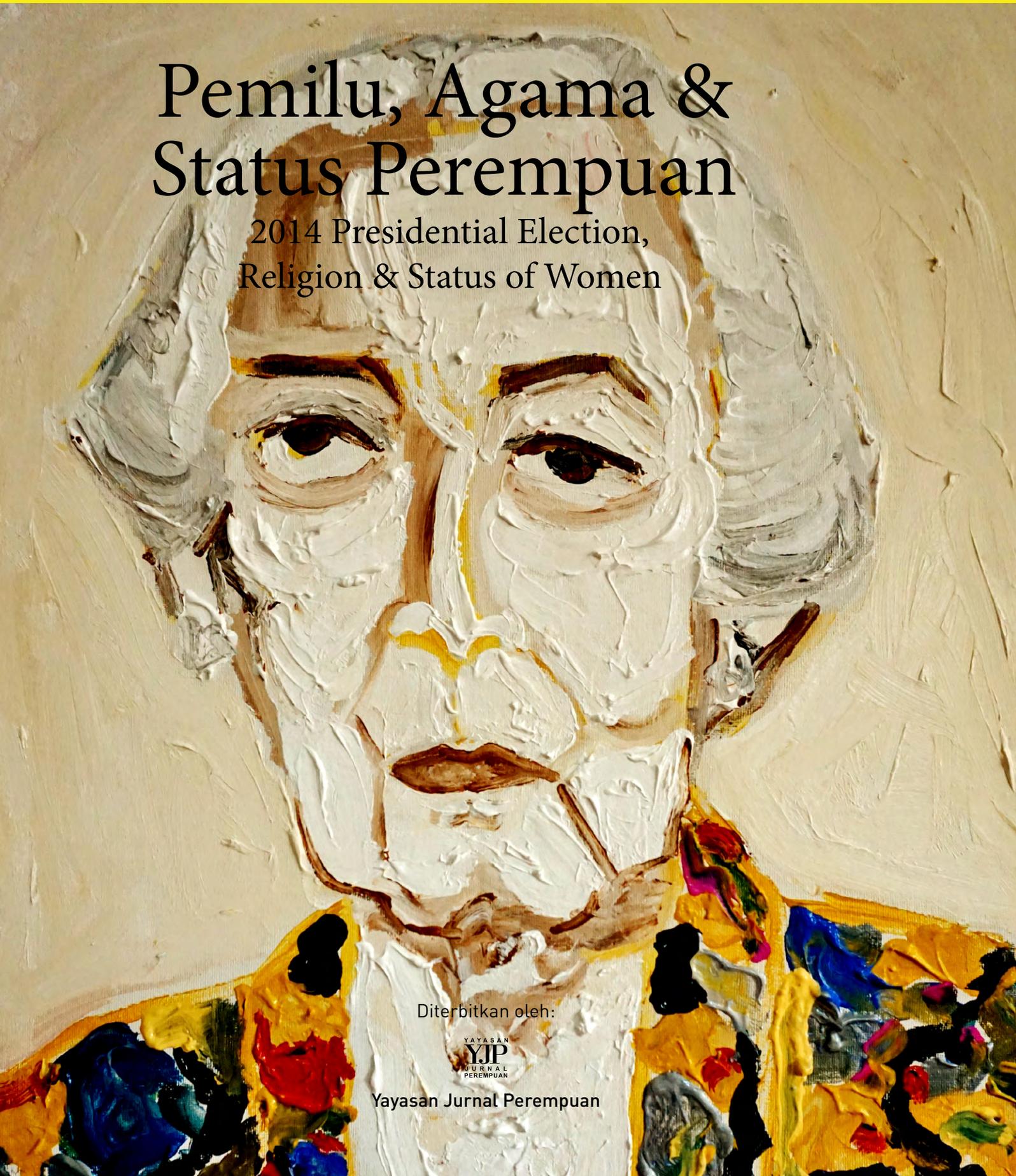
Pemilu, Agama & Status Perempuan

2014 Presidential Election,
Religion & Status of Women

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

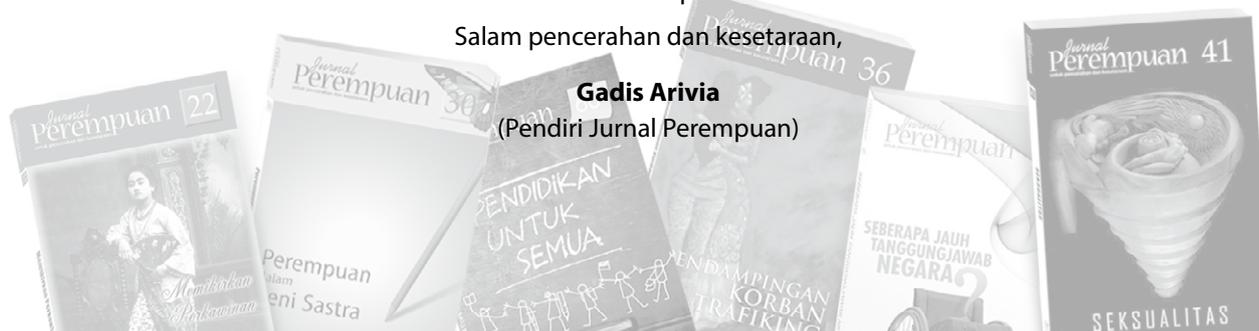
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

| | |
|---|---------|
| Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik..... | iii-iv |
| Artikel / Articles | |
| • Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i> Rocky Gerung | 175-182 |
| • Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ... Gadis Arivia | 183-189 |
| • Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i> Husein Muhammad | 191-196 |
| • Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i> Nihayatul Wafiroh | 197-205 |
| • Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i> Ira D. Mangililo | 207-219 |
| • Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i> Indraswari | 221-226 |
| • Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i> Anita Dhewy | 227-232 |
| • Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i> Dewi Candraningrum | 233-240 |
| Wawancara / Interview | |
| • Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i> Dewi Candraningrum | 241-243 |
| Kata dan Makna / Words and Meanings | 245-246 |
| Profil / Profile | |
| • Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i> Mariana Amiruddin | 247-251 |
| Resensi Buku/ Book Review | |
| • Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i> Anita Dhewy | 253-256 |

“Status Perempuan dalam Politik”

Asia adalah rumah bagi 60 persen lebih penganut agama-agama mayoritas sekarang seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan banyak aliran kepercayaan dan keyakinan lainnya. Dan Indonesia adalah rumah dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Asia tenggara khususnya memiliki karakter yang kuat sekali dalam perbedaan lanskap kebudayaan dengan konstelasi politik, ekonomi, demografi dan tradisi sosial yang sangat beragam. Aliran kebudayaan transversal bersinggungan dengan aliran agama seringkali mengawinkan kelompok-kelompok etno-religius. Dan dalam hal ini, modernitas menyumbang kelahiran dari fundamentalisme agama dalam politik kenegaraan. Dan korban paling nestapa dari kelahirannya adalah perempuan dan para Liyan. Lanskap baru ini mempengaruhi dan memberikan kontribusi pada bagaimana perempuan menggunakan agensinya, menggunakan ruang untuk melakukan manuver dalam arena publik yang bersifat strategis dan politis. Prediksi bahwa sekularisme akan tetap bertahan dan berkuasa dalam pertumbuhan kehidupan negara dan politik di Asia Tenggara pada dekade terakhir dipatahkan oleh semakin besarnya pengaruh agama terhadap negara melalui partai politiknya, terutama Indonesia dan Malaysia. Agama tidak hanya merangsek dalam arena publik tetapi juga masuk dalam proses-proses dan pokok-pokok peristiwa politik dan kenegaraan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kehidupan politik dan sosial? Banyak feminis ragu dan tak percaya karena yang memenangkan dan menguasai kursi-kursi politik dan parlemen adalah tafsir-tafsir agama yang misoginis dan tak ramah pada Liyan. Fragmentasi politik dan misoginisme baru bermunculan dalam wajah politik dunia. Bahkan institusi hegemonik seperti negara dan pasar telah diubah oleh agama umat tertentu dan kemudian banyak penganut agama lain sangat dirugikan karenanya. Matra gender diabaikan dan jadi tema

semena-mena dalam pertarungan politik, baik skala internasional, nasional dan lokal.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik praktek Islam moderat dan progresif, akan tetapi wajah-wajah tafsir yang tak ramah pada perempuan, minoritas seksual, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya masih mewarnai perjalanannya pada dekade terakhir. Tahun 1980-an merupakan tahun kebangkitan bagi revivalisme Islam di Indonesia, kemudian berkembang dengan pesat setelah jatuhnya rejim otoriter Orde Baru, Soeharto di tahun 1998. Partai-partai politik berbasis Islam (seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) berdiri dan sampai sekarang kuat menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik dan kenegaraan di Indonesia. Dan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April kemarin mereka mengalami kenaikan suara seperti yang dikabarkan dalam rubrik *RISSET Jurnal Perempuan* 82 kali ini. Dus, agama dan politik tetap tidak bisa dipisahkan dalam urusan kenegaraan. Tak hanya di pusat, sejak tahun 2001 Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu contoh ekstrem dimana perempuan kemudian banyak dikebiri hak-haknya melalui Qanun Syariah—berbeda jauh dari jaman Cut Nyak Dien dimana perempuan jauh lebih merdeka dan perkasa. Perempuan Aceh kini banyak sekali dibatasi dari cara berpakaian, berkendara, berada di ruang publik, sampai cara perempuan berswara dan tertawa pun juga diatur. Kecurigaan besar atas tafsir tak ramah gender yang masuk dalam diskursus politik ini bukan tanpa alasan.

Kerja keras perempuan dalam dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk menampilkan wajah Islam yang tidak misoginis terbengkalai dan dipukul mundur oleh wajah tafsir baru yang tak lagi ramah pada para Liyan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif jadi perempuan di parlemen 2014 ini, dimana perempuan hanya menempati sekitar 17% dari seluruh jumlah

kursi. Ini bukan kabar gembira. Status perempuan masihlah (l)iyah. Revivalisme Islam dalam politik, seperti dalam temuan Susan Blackburn dalam bukunya *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004) justru menambah beban terhadap perempuan dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya yang kentara. Setiap kali didiskusikan agama dan politik, maka aspek stabilitas dan pertahanan merupakan pokok pertama

yang dibicarakan. Sedangkan nasib perempuan dan para (l)iyah seringkali diabaikan. Tugas dari kajian Jurnal Perempuan pada edisi kali ini adalah untuk menarasikan kajian analitik untuk mempertanyakan posisi agama dalam politik dan negara secara ontologis; serta memetakan konsekuensi dan implikasinya bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi (l)iyah dalam narasi Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini. **(Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi).**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Rocky Gerung. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 175-182, 4 daftar
pustaka.

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Gadis Arivia. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 183-189, 16 daftar
pustaka.

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform

of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campaigned by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Husein Muhammad. Komisioner Komnas Perempuan. JL.
Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta
10310, Telp. (021) 3903963

Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah dan Al Adalah

Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah.

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 191-196, 6 daftar
pustaka.

This paper examines theological sources of Islam on the status of women in Politics. Al Quran states that equality between men and women are guaranteed in politics such as in Quran: Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71. Islamic politics based on the following postulates: first, freedom (*al Hurriyyah*). Human beings are only serving God. Second, equality (*Musawah*, non-discriminatory). All human being are equal in front of Allah. Third, respect to other human beings (*Karamah al Insan*/ preserving the other human's dignity). Fourth, justice (*'Adalah*). Theological sources of Islam has given foundation for the contemporary status of women in politics which had long been stripped away due to misogynistic interpretation of Quran. Quran has *ontologically supply equality and justice to human rights that can be used in politics and state affairs.*

Keywords: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politics

Kajian ini membahas sumber-sumber teologi dalam Islam perihal status perempuan dalam politik. Alquran menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan politik tersebut (Q.S. Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71). Prinsip politik Islam berdasarkan beberapa postulat: *pertama*, kebebasan (*al Hurriyyah*). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. *Kedua*, kesetaraan (*Musawah/Equality* dan *non diskriminasi*): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. *Ketiga*, penghormatan manusia (*Karamah al Insan/Dignity*). *Keempat*, keadilan (*'Adalah/Justice*). *Sumber-sumber teologi Islam memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tentang kesetaraan dalam politik dan kenegaraan.*

Kata kunci: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politik.

Nihayatul Wafiroh. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. Gajah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281. Telephone/Fax : +62-274-562570

Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 197-205, 21 daftar pustaka.

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. Fatayat, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of Fatayat in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated Fatayat to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era Fatayat experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuisism" ideology. In order to maintain its existence, Fatayat decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while also made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era kolonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. Fatayat adalah saudara bagi organisasi massa bernama Nadlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan Fatayat dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada Fatayat untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisisme" Negara. Fatayat kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Ira D. Mangililo. Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 207-219, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men

and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi—suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Indraswari. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141 . Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 221-226, 18 daftar pustaka.

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyangkut tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitisasi untuk meminggirkan suara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Anita Dhewy. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 227-232, 7 daftar pustaka.

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections—showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan suara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Dewi Candraningrum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 233-240, 8 gambar, 6 daftar pustaka.

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan

Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Dewi Candraningrum

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Naskah Diterima 8 Mei 2014. Direvisi 1 Juli 2014. Disetujui: 19 Juli 2014

Abstract

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Abstrak

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Pendahuluan

Riset kali ini menarasikan perjumpaan antara agama dan politik di Pemilihan Legislatif 9 April dan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 (selanjutnya disingkat Pemilu: Pileg dan Pilpres) dalam menimbang status perempuan. Pendekatan feminisme kerap curiga dan tak percaya bagaimana aliansi kedua terminologi itu dapat dan bisa sungguh-sungguh melayani amanat keadilan gender dan keadilan sosial. Disamping melakukan dokumentasi teoritis, kajian pada Jurnal Perempuan Edisi 82 kali ini, salah satunya, merupakan dokumentasi FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan pada Selasa 1 Juli 2014 jam 13-17 WIB di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta. FGD ini difasilitasi oleh Mariana Amiruddin (Dewan

Redaksi Jurnal Perempuan) dengan narasumber berikut: Ade Kusumaningtyas (RAHIMA), Husein Muhammad (Komnas Perempuan), Siti Khadijah Nasution (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Manneke Budiman (FIB, UI), Masruchah (Koalisi Perempuan Indonesia), Muhamad Ali (Univ California, Riverside), Nur Iman Subono (FISIPOL UI), Septemmy Lakawa (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), Siti Musdah Mulia (Megawati Institute) dan Titi Sumbung (Indonesian Center for Women in Politics). Bahasan konseptual ketiga terminologi pada judul di atas, akan dilengkapi dengan fakta-fakta politik tahun 2014 ini, yaitu fakta Pileg dan fakta Pilpres.

Countries where the law requires the head of state* to be ...



Note: Map does not include eight countries that ban clergy from being head of state.
 *Excludes figurehead monarchs in ceremonial monarchies

Source: Pew Research Center

PEW RESEARCH CENTER

Gambar 1. Most Countries with Religious Requirements for Heads of State are in the Middle East-North Africa

Jabaran Politiko-Etimologi: Religion, Agama, dan Dien

Dalam paparan pembukanya, Muhamad Ali membedah jabaran etimologi dari ketiga kata yang memiliki kompleksitas makna yang berbeda dan implikasinya dalam kehidupan beragama orang Indonesia, yaitu: *religion* (dari Bahasa Inggris), *agama* (dari Bahasa Sansekerta), dan *dien* (dari Bahasa Arab). Agama adalah kata baru yang berasal dari paradigma modern. Dan *religion* sebagai konsep barat kemudian mempengaruhi konsep agama, yaitu dalam konteks Kristen yang terbaratkan. Pemahaman agama kemudian menjadi pemahaman ranah privat, jika di Asia. Sementara secara etimologis *agama* berasal dari bahasa Sanskerta—yang ini kemudian seolah-olah identik dengan *religion*. Demikian juga dengan Bahasa Arab yang identik dengan *agama*. Hubungan agama dan politik sulit untuk diubah. Secara etimologis, agama dan politik bisa dibedakan, tapi tidak bisa dibedakan. Di Asia, khususnya di Indonesia, agama adalah urusan administratif, yaitu urusan ulama. Demikian juga agama adalah urusan politik. Indonesia sesungguhnya adalah Negara sekular, seperti yang dinarasikan secara historis dan sosiologis. Mengapa? Karena Indonesia memiliki departemen agama, yang merupakan contoh paling kasat mata dari sekularisasi. Sementara definisi pemimpin agama dan pemimpin politik, dalam Negara religius adalah menjadi satu, sedangkan Indonesia tidak mengadopsi sistem pemimpin agama dan Negara untuk menjadi satu. Dus memisahkannya. Indonesia tidak memperbolehkan ada kesatuan antara pemimpin agama dan pemimpin politik (seperti terlihat dalam

grafik *Pew Research Center* Juli 2014 berikut). Ini adalah jalan demokrasi, secara administratif dan politik, agama kemudian terpisah.

Narasi Primordial & Visual Agama dalam Pemilu

Tetapi jika dilihat dari lensa budaya dan sosio-historisnya, yaitu persoalan *mindset*, masyarakat Indonesia masih menyatukan agama dan politik dalam satu entitas. Sehingga partai politik mau tidak mau harus memainkan kartu agama, bahasa masyarakat adalah bahasa agama. Karena semua partai menggunakan bahasa agama. Dan kemudian agama menjadi faktor pelemah, karena dia berfungsi sebagai faktor pemisah, faktor pembeda, dan faktor pemecah-belah—minoritas suku, minoritas gender, dan minoritar sekte. Namun demikian, agama juga telah menjadi faktor positif, jika saja agama dijadikan sumber normatif, yaitu ajaran-ajaran yang relatif universal—yang bisa dipakai penganut agama lain atau bukan penganut agama, misalnya norma-norma keadilan, kesetaraan, dan keamanan. Hal ini dibenarkan oleh Siti Khadijah Nasution dari KPPA. Agama adalah pisau bermata dua—tergantung bagaimana politisi dan partai politik memainkan kartu ini dalam menarik massa. Persoalan terbesar adalah bahwa bahasa-bahasa konservatif telah dipakai oleh partai-partai sekular untuk menarik massa tanpa memahami pesan normatif ini, dan ini adalah kemunduran. Ini menggiring proses demokratisasi pada meruncingnya “politik identitas”. Lalu pertanyaan-pertanyaan sektarian akan dilontarkan untuk menarik massa atau melemahkan kubu



Gambar 2. Spanduk dukungan terhadap salah satu capres

politik lawan: siapa orang tuanya? Apa agamanya? Demikian Muhammad Ali menjelaskan dalam FGD ini.

Dalam Pileg dan Pilpres kemarin politik identitas digunakan dalam caranya yang amat masif. Caleg perempuan, baik dari partai berbasis agama seperti PPP, PKB, PAN, PKS, PBB serta partai sekular seperti Partai DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, NASDEM, dan lain-lain menggunakan narasi primordial seperti asal-usul dan penamaan bahasa Arab, demikian juga penggunaan foto-foto berjilbab untuk mendulang massa.

Indonesia sampai dengan sekarang memiliki kurang lebih 202.9 juta yang mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim (kurang lebih 88.2% dari seluruh penduduk Indonesia sejumlah 237 juta). Mayoritas mengadopsi tradisi Sunni, dan ada sekitar 1 juta mengadopsi tradisi Syiah, dan kurang lebih 400.000 adalah Ahmadiyah. Secara umum ada dua kategori yang bisa dilihat, yaitu modernis dan tradisional—tetapi ini tidak menafikan aliran-aliran lain yang ada dalam tradisi Islam. Sebagai rumah dari agama-agama besar di dunia, terutama rumah terbesar dari umat Islam dunia, Indonesia dikejutkan oleh Pileg pada 9 April lalu. Yang pertama adalah bahwa perolehan suara PDIP melemah dan perolehan suara partai-partai berbasis agama menaik. Pada tahun 2009 total suara untuk partai-partai yang mengidentifikasi dirinya pada Islam adalah 29%, merupakan titik terendah selama beberapa Pemilu. Sedangkan prediksi polling tahun ini untuk mereka hanya 15-25 persen, tetapi kemudian, terbukti hasil Pileg menunjukkan kenaikan pesat yaitu 31-32% dari keseluruhan pilihan nasional—dimana PKS turun 1 persen saja.

Perihal ini mengkonfirmasi kenaikan ideologi Islam dalam peta politik Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai mesin politik pada Pilpres. Hampir semua partai, baik sekular dan berbasis agama, menggunakan narasi visual berbasis agama, yaitu Islam, untuk menarik massa lebih banyak. Misalnya figur Gusdur secara primordial menjadi rebutan bagi narasi visual partai-partai seperti PKB dan PPP. Bahkan dalam Pilpres, Capres No 1 Prabowo-Hatta menggunakan narasi primordial dan narasi agama untuk memenangkan pemilih pesantren-pesantren dengan basis Gusdurian. Yang ini kemudian diprotes oleh keluarga Gus Dur. Demikian juga dengan Capres No 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla yang juga menggunakan momen Ramadhan dan narasi visual Islam untuk menaikkan elektabilitasnya.

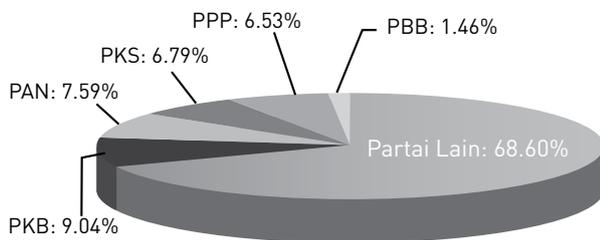
Wajah-wajah politisi kemudian berubah-ubah sesuai dengan massa yang dikunjungi. Apabila mengunjungi massa konservatif, maka wajah agama yang dipakai. Sedangkan apabila mengunjungi massa nasional, maka wajah-wajah inklusif, pluralis, universalis, kemudian digunakan. Berbagai bentuk narasi primordial dan visual tersebut digunakan sebagai alat politik praktis, sedangkan muatan normatifnya seringkali dilupakan, atau dengan sengaja ditiadakan demi memperluas elektabilitas. Di samping itu, hampir tidak ada partai-partai berbasis Islam yang kemudian mengkampanyekan agenda-agenda (s)yariah Islam. Satu-satunya partai yang mengagendakan adalah Partai Bulan Bintang yang hanya mendapatkan 1.5% dalam Pileg kemarin (KPU 2014). PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menjadi salah satu pemenang dari partai berbasis Islam, terutama warga NU—karena memiliki garis primordial dengan



Gambar 3. Spanduk dukungan terhadap masing-masing capres

Gus Dur—yang naik menjadi 9% di Pileg 2014 dari 4.9% di tahun 2009 (KPU 2014). Keberhasilan ini terutama karena kedekatan mereka dengan warga NU yang memiliki basis massa besar terutama di Jawa Timur. Selain PKB, PAN meraih 7.5%—mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan, dibanding PKS yang hanya 6.9% dan PPP 6.5% (KPU 2014).

Pileg 9 April 2014 tidak mengindikasikan kenaikan ideologi Islam, tetapi ketahanan partai Islam dalam demokrasi dan menunjukkan kemampuannya beradaptasi dalam iklim politik yang berubah-ubah. Mereka telah berada dalam pusat kekuasaan, dalam pemerintahan SBY, dan mereka kemudian semakin pragmatis karena telah menikmati kekuasaan demokrasi—yang membuat mereka kemudian tidak mengajukan agenda-agenda (s)haria Islam.



Gambar 4. Perolehan Suara 5 Partai berbasis slam (PPP, PKB, PAN, PKS, PBB)

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum: Hasil Pileg 2014.

Pertarungan politik nilai—amanat normatif dari simbol-simbol yang dieksploitasi tersebut—hampir-hampir tidak ada. Muhammad Ali dalam FGD YJP menyarankan perlu dikembangkan politik nilai (*politics of value*)—yaitu apa yang manusia katakan harus juga manusia perbuat. Dalam perbandingan penelitian politik Islam secara global, dia melanjutkan bahwa Amerika adalah Negara sekular, tetapi masyarakatnya religius. Sementara, harus diakui, masih menurutnya, bahwa agama menjadi penghambat demokratisasi di dalam dunia Islam, terutama di Timur Tengah karena menjadi faktor pemecah-belah. “Indonesia seharusnya menjadi model demokrasi. Indonesia jauh lebih baik dari Timur Tengah—dalam konteks agama, politik dan demokratisasi. Tapi Indonesia belum maju pesat—karena hambatan faktor korupsi, ketaksetaraan gender, dan masih banyak problem anomali kekuasaan yang muncul. Demokrasi harusnya adalah jalan, bukan tujuan. Agama dan Negara bersatu, maka akan ada diskriminasi. Indonesia masih lebih baik, karena tidak menyatukan administrasi agama dan politik”, demikian paparnya.

Misi Revolusioner Agama dalam Politik: Mandat Kesetaraan & Keadilan

Sementara itu, dalam FGD YJP ini, Manneka Budiman menerangkan secara berbeda, bahwa “secara fakta, sampai kapan pun, mustahil agama dipisahkan dari politik. Tidak akan terjadi, dia hanyalah berupa ideal. Kita akan terjebak dalam suatu ilusi. Tidak akan pernah terjadi sungguhan. Pembedaan bisa terjadi, tetapi pemisahan tidak bisa dilakukan. Bangunan agama dalam Negara itu jauh lebih tua dari manusia. Agama membantu orang untuk ‘sintas’—ketika realitas kehidupan demikian berat, kemudian agama menyediakan jawaban-jawaban”. Menurut Manneka sampai hari ini Indonesai belum berhasil mengangkat potensi konstruktif agama. Dalam sejarahnya, agama lahir sebagai gagasan revolusioner—dari tak beradab menjadi lebih beradab. Konteks historisnya, mereka lahir sebagai potensi revolusioner. Tetapi kemudian, dengan semakin kuatnya institusionalisasi agama, kemudian agama menjadi kekuatan yang reaksioner dan konservatif—dia bukan kekuatan liberasi tetapi kekuatan represi. “Kalau semangat itu tidak lahir, maka monopoli elit politik yang konservatif—bisa dilawan sangat efektif oleh agama sendiri”, terangnya. Semangat agama yang lama terkubur ini telah lama terinstitusionalisasi. Pengaruh agama ini tidak bisa dipisahkan dari mentalitas masyarakat—yaitu untuk mengubah kondisi politik menuju kesetaraan dan kesejahteraan. Dus intervensi agama dalam Negara bisa dilihat melalui dua wajah, apakah justru Negara yang memanfaatkan agama, atau sebaliknya. “Kehadiran Departemen Agama menegaskan wujud intervensi agama dalam Negara atau bisa juga wujud kontrol Negara atas agama”, papar Manneka. Politik identitas bisa bermakna ‘membebaskan’, yaitu membangun progresivitas—untuk melawan dominasi siapa pun yang berkuasa. Atau bisa juga bermakna represif—tatkala kemudian dia berbahaya, mengedepankan simbol-simbol primordial, seksis, dan sektarian pada minoritas Liyan, misalnya sekte-sekte dan gender ketiga. Jadi simbol agama perlu ditilik konteksnya. Nabi-nabi, bahkan, lahir untuk melawan kekuasaan elit agama dan elit Negara yang korup, autoritarian, totaliter, sewenang-wenang dan tidak adil pada perempuan dan kelompok rentan.

They were not founders of societies for ethical culture nor the proponents of humanitarian projects for social reform or cultural ideals. The salvation of the soul alone was

the centre of their life and work. Their ethical ideals and the practical results of their doctrines were all based on that alone, as were the consequences of purely religious motives. We shall thus have to admit that the cultural consequences of the Reformation were to a great extent,... unforeseen and even unwished-for results of the labours of their reformers. They were often far removed from or even in contradiction to all that they themselves thought to attain. (Weber, 1930: 89-90).

Max Weber mencontohkan 'sintas' ini dalam dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1930) menarasikan bagaimana semangat protestanisme, yaitu religioisitas, mengubah Eropa menjadi Negara-negara yang memajukan narasi kesejahteraan dan keadilan—yang ini kemudian melahirkan konsep negara kesejahteraan. Sedang dalam dunia Islam, 'Islam' dan 'Muslim', sebagai dua etimologi tidak univokal dan seragam, tetapi multivokal dan beragam—baik dalam kaitan tafsir dan keragaman tradisi. Klaim-klaim purifikasi dan universalisme, tanda-penanda, juga telah lama memiliki dinamikanya dalam dunia Islam di Indonesia. Husein Muhammad memaparkan dalam FGD YJP tentang makna tanda-penanda ini dalam satu proyek 'sintas' atas keadilan seperti dipaparkan Manneke Budiman sebelumnya:

“Konstruksi nalar religius adalah konstruksi abad pertengahan di Arabia. Kemudian ini stagnan. Indonesia perlu melakukan rekonstruksi norma-norma dan terminologi-terminologi agama untuk mendapatkan makna yang komprehensif dan tidak campur aduk. Yaitu menuju 'sintas'. Masing-masing kamu kami jadikan sebagai jalan, jalan ini adalah 'syariah'. *Dien* berbeda dengan *syariah*, *dien* adalah satu, sedangkan *syariah* adalah jamak. Nilai-nilai agama adalah nilai eskatologis, universal dan personal. *Syariah* adalah kontekstual, *dien* adalah universal. Mensakralisasi sesuatu yang profan—kemudian menjadikan kehidupan beragama menjadi berbahaya. Kebudayaan masyarakat muslim adalah kebudayaan teks—peradaban teks, misal anak perempuan pergi sendirian adalah haram. Khilafah adalah Negara mondial—universal, selain agama penguasa adalah agama kedua. Awal abad ke-20, baru muncul, bagaimana hubungan agama dan kebudayaan dan politik. Islam tidak memiliki konsep politik. Agama yang ada

dalam teks adalah kritik—tidak melakukan kezaliman, diskriminasi, eksploitasi, spekulasi naif, kepentingan umum atau tidak. Setiap tindakan politik, ekonomi, kebudayaan, fungsi nabi adalah memutus rantai penindasan. Agama memiliki fungsi-fungsi profetik—membebaskan mereka dari kezaliman dan kebodohan—kepada cahaya dan keadilan. Agama menjadi jatuh jika dia terjun bebas dalam politik. Platform Indonesia sudah indah—Pancasila”.

Sementara dari teologi kristen, Pendeta Septemmy Lakawa (STT Jakarta) dalam FGD ini, memaparkan bahwa relasi dan konflik dalam agama dan politik ini seperti relasi antara tanda-penanda-petanda: “Konflik agama melibatkan banyak dimensi. Dan konflik bukan hanya dipicu oleh satu sumber, yaitu agama, tetapi dipicu oleh banyak dimensi. Dan identitas serta simbol agama menjadi alat yang paling mudah untuk digunakan sebagai alat konflik”. Tumbuhnya cendekiawan Muslim menunjukkan relasi baru dan kehidupan baru dalam praktek keberagamaan. Ada dualisme yang sangat besar, untuk berpolitik—antara boleh atau tidak boleh berpolitik. Jika bicara agama, maka perlu didiskusikan tentang 'kekuasaan'. Septemmy melanjutkan:

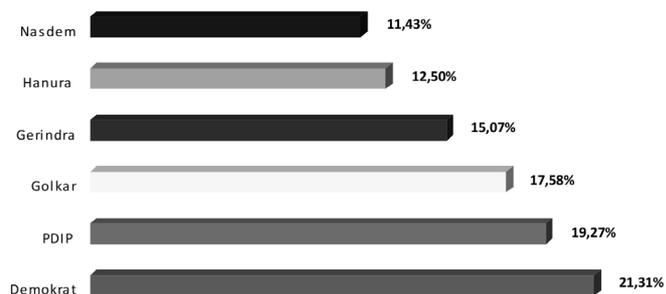
“Siapa yang berkuasa atas agama, siapa yang berkuasa atas institusi politik—merekalah yang kemudian akan kuat berkuasa. Kitab-kitab lahir amat politis—agama adalah sebuah realitas *beyond*. Jadi imajinasi religius itu menguat pada konteks penindasan politik. Indonesia sejarahnya memungkinkan. Dalam Kristen ada teologi dan filsafat. Ada 400-an sekolah teologi, sangat minoritas, harusnya pendidikan teologi di bawah DIKTI. Karena teologi memungkinkan kita berimajinasi *beyond doctrine*. Pendeta adalah pelayan—memberikan tafsir yang membebaskan umat. Teologi dan filsafat harus menjadi sumber kekuatan dalam agama, dan upaya menolak upaya domestifikasi atas agama—di ruang publik. Suara rakyat bukan suara tuhan—karena simbol-simbol yang dipakai rakyat itu adalah simbol-simbol maskulin. Yang hampir tidak ada sampai kini, dan tidak ada percakapan tentang 'mimpi kita Indonesia' itu seperti apa? Hal-hal yang tidak muncul di ruang publik, harus dimunculkan, apakah dia menjadi terlalu berbahaya, atau tidak, dan ini adalah *test-case*. Otoritas profan dan sakral dapat bertemu. Ini bermasalah jika dia bertemu dalam Negara yang korup. Dan ini

menjadi alat-alat destruktif bagi perempuan dan kelompok rentan. Harapan kita, supaya personifikasi politik dapat berbasis nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

Status Perempuan dalam Pemilu?

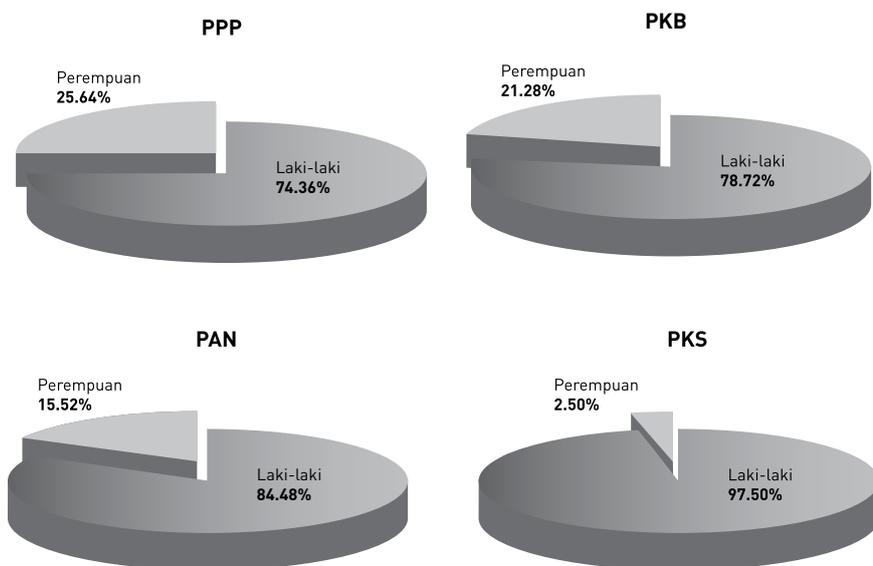
Lalu bagaimana dengan hak, peran, partisipasi, dan status perempuan dalam Pileg dan Pilpres? Perempuan aktif terlibat dalam Pileg, meskipun mesin partai politik banyak mengecewakan perempuan seperti dilaporkan dalam banyak kajian di Jurnal Perempuan Edisi 81 *Perempuan Politisi* Mei 2014 (lihat pada rubrik Riset Anita Dhewy), yaitu masih sedikitnya perempuan menjabat di struktur partai dan semakin menurunnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Pileg 2014 ini bukan kabar menggembirakan bagi gerakan politik perempuan karena jumlahnya turun dari 18% di tahun 2009 menjadi 17% di tahun 2014. Bagaimana partai berbasis Islam memberikan ruang aktivitas politik untuk perempuan? Anggota legislatif jadi (selanjutnya disingkat Aleg) dari PPP adalah sejumlah 25.64%; PKB adalah 21.28%; PAN sejumlah 15.52% Aleg perempuan; dan paling sedikit adalah PKS sejumlah 2.50%. 97.50% Aleg PKS laki-laki mendominasi kursi di parlemen. Ini kabar yang sama sekali tidak bagus, yang mengafirmasi kenaikan misoginisme partai berbasis agama pada status perempuan untuk kasus PKS.

Bagaimana dengan status perempuan dalam partai-partai yang tidak berbasis agama, atau kerap disebut sebagai partai nasionalis atau partai sekular? Kabarnya juga tidak begitu menggembirakan. Aleg perempuan dalam Demokrat mengungguli dari keenam partai, yaitu meraih 21.31% seperti Grafik 3 dan 4 berikut, kemudian diteruskan oleh PDIP 19.27%, Golkar 17.58%, Gerindra 15.07%, Hanura 12.50% dan paling sedikit adalah Nasdem 11.43%. Dalam struktur partai dan parlemen, kursi masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan, minoritas seksual dan kelompok rentan lain, hampir-hampir tak terlihat dalam Pemilu 2014 kali ini.



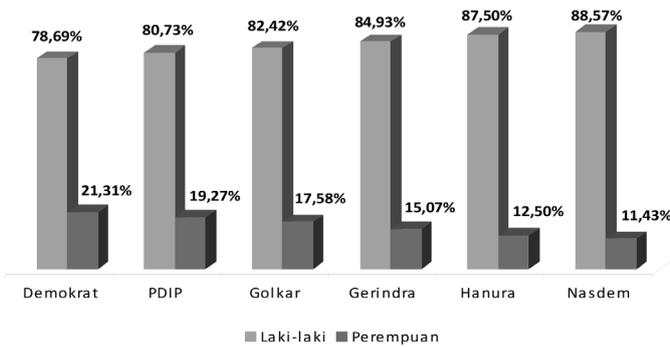
Gambar 6. Persentase Anggota Legislatif Perempuan di 6 Partai berbasis non agama dilihat dari jumlah anggota DPR RI tiap partai politik.

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum: Hasil Pileg 2014



Gambar 5. Perbandingan Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin pada 4 Partai Berbasis Agama

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum: Hasil Pileg 2014



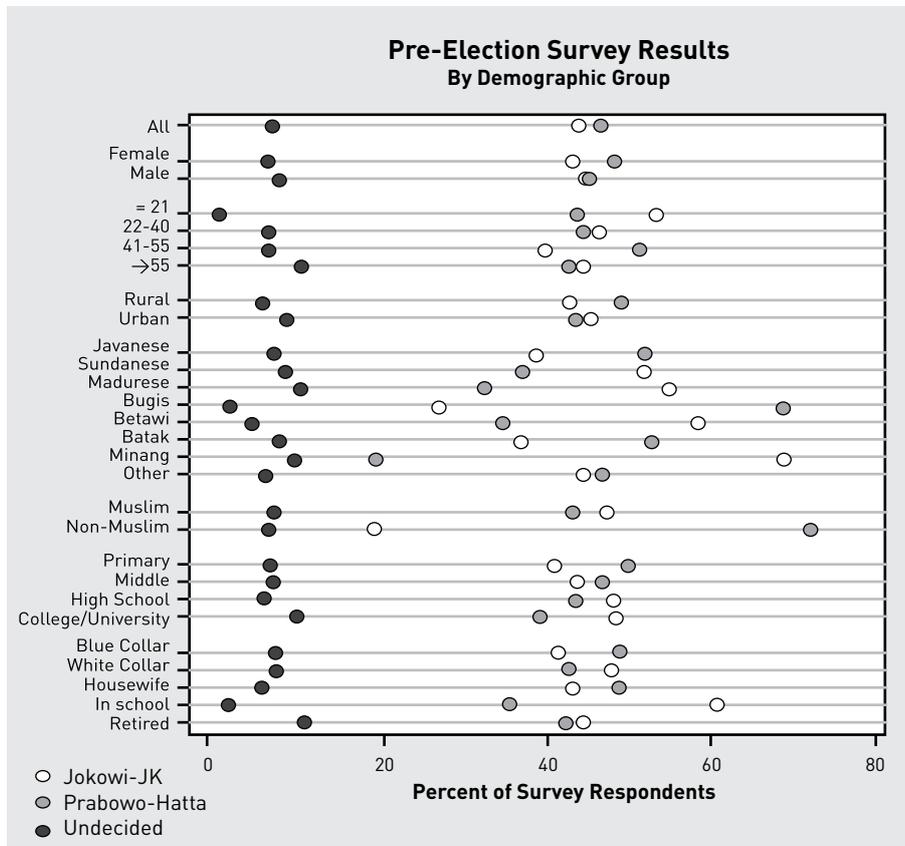
Gambar 7. Persentase Anggota Legislatif di Tingkat Nasional Menurut Jenis Kelamin pada 6 Partai Berbasis Non Agama

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum: Hasil Pileg 2014

Bagaimana kemudian dengan Pilpres? Apakah perempuan masih tak terlihat? Pilpres 9 Juli lalu menarasikan bagaimana perempuan berpartisipasi dan bekerja keras untuk terlibat dalam platform visi dan misi Capres-Cawapres, baik dari dua kubu. Hal ini seperti dilaporkan Mariana Amiruddin yang menginisiasi pemantauan visi-misi kedua pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla untuk membangun

paradigma politiknya atas status perempuan. Hasil dari polling SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) menunjukkan bagaimana pemilih perempuan daripada pemilih laki-laki banyak memilih Jokowi-Kalla dalam survei sebelum dan sesudah Pilpres yang diolah oleh Tom Pepinsky dari SMRC seperti Grafik 5 berikut. SMRC menyebutkan bahwa 56% perempuan lebih memilih daripada 50% laki-laki atas Jokowi-Kalla. Sedang untuk Prabowo-Hatta lebih sedikit perempuan 44% dari 50% laki-laki yang memilihnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan diumumkankannya pemenang hitung manual KPU (Komisi Pemilihan umum) atas pasangan JK yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa: 62.576.444 (46,85 persen) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla: 70.997.833 (53,15 persen) (Sumber KPU, 22 Juli 2014) – apakah kemudian kabinet baru, strategi kebijakan eksekutif, dan eksekusi-eksekusi politik dari 2014-2019 akan berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas? *Jurnal Perempuan* akan mendokumentasikan kajian ini di masa akan datang.



Gambar 8. Pemilih Perempuan Banyak Memilih Jokowi-Kalla Dibanding Pemilih Laki-laki

Sumber: Tom Pepinsky (Cornell University) diolah dari SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting), Pilpres 2014. (tompepinsky.com & <http://www.saifulmujani.com/>).

Penutup

Dalam FGD, Masruchah dari KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) menerangkan bahwa hak politik adalah hak asasi. "Partai politik sekarang, faktanya, tidak memiliki spirit-spirit kebebasan dengan masuknya agama dalam politik. Ada 362 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif—jilbabisasi—larangan keluar malam—larangan pelacuran, Perda-Perda sangat kabur, sangat sumir dan tidak pasti. Politik menjadi tidak pasti, tidak sensitif gender, dan yang paling dikorbankan adalah perempuan". "Pernyataan ini menunjukkan bagaimana akhirnya liyan dikontrol oleh agama. Fakta agama sebagai alat kekerasan adalah bukti bahwa politisasi agama telah menang dan menindas perempuan. Dan menang paska reformasi", seperti diterangkan Masruchah. Sementara Ade Kusumaningtyas dari RAHIMA, dalam FGD ini menyatakan bahwa, "realitas sosiologis tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Identifikasi, misalnya penjajah, identik dengan siapa, maka kemudian muncul bibit-bibit perpecahan. UU No 1/1974 tentang perkawinan, misalnya, yang merupakan produk manusia, seharusnya masih bisa didiskusikan". "Ini adalah qanun—sebagai produk manusia. Kita perlu menghadirkan bagaimana pengalaman-pengalaman keagamaan personal hadir dalam ruang publik. Dengan demikian keragaman dapat terjamin", terangnya. Dari dunia aktivisme politik perempuan, Titi Sumbung menambahkan bahwa:

"Politik adalah alat kekuasaan untuk melayani. Tapi sekarang politik digunakan sebagai alat-alat untuk merepresi. Ketidaktegasan mengenai penegakan hukum. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender, misalnya, sampai sekarang tidak bisa diterima—karena istilah kesetaraan tidak bisa diterima terutama oleh PKS".

Sementara Direktur Megawati Institute, Musdah Mulia, menerangkan bahwa upaya-upaya untuk menyuarakan keadilan gender tetap harus disuarakan dan dikawal. "Ini adalah lahan baru untuk jihad. Ketuhanan adalah nilai-nilai spiritual. Relasi agama

dan politik masih belum selesai. Dan agama nyata-nyata digunakan oleh partai politik sebagai alat represi. Negara abai, tidak hadir, dalam upaya pembangunan bidang agama—yaitu agama yang kompatibel dengan demokrasi dan narasi keadilan-kesetaraan. Perda-Perda (s) yariah di daerah-daerah sangat kental dengan nilai-nilai patriarkal, feodal, dan sektarianisme—yang terlihat sekali pembuatannya dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak melibatkan tim ahli baik dari para mufassis dan ahli gender. Dan ini adalah nilai-nilai inkonstitusional. Mengarah kepada terbentuknya Negara yang berbentuk teokrasi", paparnya.

Paparan data Pileg dan Pilpres mengafirmasi bahwa status perempuan dan liyan masih rentan, baik dalam struktur partai politik, kursi parlemen, dan dalam paradigma pembangunan eksekutif yang akan dijalankan oleh presiden terpilih nanti. Seluruh gerakan perempuan, baik paradigmatis dan praktis, perlu bersinergi, bahu-membahu, untuk terus mengawal, mengkritisi, dan merawat naskah-naskah keadilan ini untuk peradaban yang setara di era kabinet 2014-2019 mendatang.

Daftar Pustaka

- Dhewy, Anita. "Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?" dalam Perempuan Politisi. *Jurnal Perempuan* Vol 19 No 2 Mei 2014. Jakarta: YJP Press.
- TEMPO. Pasang Gambar Gus Dur, Tim Prabowo Diminta Izin. Senin 16 Juni 2014. <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/16/078585395/Pasang-Gambar-Gus-Dur-Tim-Prabowo-Diminta-Izin>
- KPU 2014. *Rekapitulasi Data Pemilu 2014: Data Caleg/Aleg Jadi dalam partai-partai Islam*. Diakses 15 Juli 2014.
- Weber, Max. 1905. *The Protestant Ethic and the Spirit Capitalism* (trans by Talcott Parsons in 1930). London: Unwin Hyman.
- Komisi Pemilihan Umum. Data Pileg dan Pilpres 2014. www.kpu.go.id diakses dari 9 April sd 22 Juli 2014.
- Pew Research Center. Religious requirements for heads of state, Juli 2014. Diakses 29 Juli 11.59 WIB. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30-countries-heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/#comments>

Catatan Belakang

FGD YJP Vol 82 (*Focus Group Discussion* Yayasan Jurnal Perempuan). Selasa 1 Juli 2014 di Kantor Yayasan Jurnal Perempuan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

| | |
|---|---------|
| Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik..... | iii-iv |
| Artikel / Articles | |
| • Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i> | 175-182 |
| <i>Rocky Gerung</i> | |
| • Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ... | 183-189 |
| <i>Gadis Arivia</i> | |
| • Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i> | 191-196 |
| <i>Husein Muhammad</i> | |
| • Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i> | 197-205 |
| <i>Nihayatul Wafiroh</i> | |
| • Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i> | 207-219 |
| <i>Ira D. Mangililo</i> | |
| • Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i> | 221-226 |
| <i>Indraswari</i> | |
| • Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i> | 227-232 |
| <i>Anita Dhewy</i> | |
| • Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i> | 233-240 |
| <i>Dewi Candraningrum</i> | |
| Wawancara / Interview | |
| • Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i> | 241-243 |
| <i>Dewi Candraningrum</i> | |
| Kata dan Makna / Words and Meanings | 245-246 |
| Profil / Profile | |
| • Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i> | 247-251 |
| <i>Mariana Amiruddin</i> | |
| Resensi Buku/ Book Review | |
| • Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i> | 253-256 |
| <i>Anita Dhewy</i> | |

